

KODE TUTUR PEMIMPIN LOKAL DALAM PEMAKAIAN JARGON 'OTONOMI DAERAH' DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR



Oleh: IRMA AMALIA (02340030)

Indonesia

Dibuat: 2007-04-10 , dengan 3 file(s).

Keywords: Kode tutur, pemakaian jargon

ABSTRAK

Latar belakang penelitian yang berjudul “Kode Tutur Pemimpin Lokal dalam Pemakaian Jargon ‘Otonomi Daerah’ di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar,” adalah adanya perbedaan kode tutur pemimpin lokal khususnya dalam hal otonomi daerah. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua macam kode tutur yaitu kode terbatas dan kode terjabar.

Adapun pokok penelitian ini lebih ditekankan pada kode tutur pemimpin lokal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kode tutur pemimpin lokal dalam pemakaian jargon otonomi daerah yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, penataan personil, implementasi kewenangan, pendapatan desa, dan pelebagaan politik lokal.

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kode tutur pemimpin lokal dalam pemakaian jargon otonomi daerah yang berkaitan dengan, (1) penataan kelembagaan, (2) penataan personil, (3) implementasi kewenangan, (4) pendapatan desa, dan (5) pelebagaan politik lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif. Wujud data dalam penelitian ini adalah kode tutur dalam komunikasi yang dilakukan antara responden dengan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Untuk menjaga kesahihan data, maka dilakukan teknik rekam dan teknik catat. Data dianalisis dengan mendeskripsikan semua kode tutur pemimpin lokal dalam pemakaian jargon otonomi daerah yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, penataan personil, implementasi kewenangan, pendapatan desa, dan pelebagaan politik lokal.

Dari hasil analisis data ditemukan dua kode tutur yaitu kode terjabar dan kode terbatas. Dalam hal penataan kelembagaan dan penataan personil, kode terbatas lebih banyak digunakan dari pada kode terjabar, antara lain kode terjabar sering digunakan oleh kepala dusun Tambak dan beberapa ketua RT serta RW. Berkaitan dengan implementasi kewenangan dan pendapatan desa, kode terjabar juga sedikit yang menggunakan, antara lain kepala desa dan kepala dusun Tambak. Berkaitan dengan pelebagaan politik lokal, perangkat desa juga lebih banyak yang menggunakan kode terbatas. Kode terbatas paling banyak digunakan oleh sekretaris desa dan ketua urusan. Penelitian lain juga dapat melanjutkan penelitian ini dilihat dari segi tempat yang berbeda.

Abstract

Background penelitian entitled "Local Leaders Said Code in Use of Jargon 'Autonomy' in Village District Pagergunung Kesamben Blitar regency," is the discrepancy between the code says local leaders, especially in terms of regional autonomy. This difference is caused by several factors. There are two kinds of speech codes is limited to code and code terjabar.

The subject of this study more emphasis on local leaders said code. The problem in this research is how the code says a local leader in the use of jargon associated with the regional autonomy of institutional arrangement, the arrangement of personnel, implementation of the authority, revenue villages, and local political institutionalization.

The research is intended to describe the code says a local leader in the use of jargon associated with regional autonomy, (1) institutional arrangements, (2) the arrangement of personnel, (3) implementation of the authority, (4) revenue villages, and (5) institutionalization of local politics .

The research method used was descriptive qualitative research method. Being the data in this study is code speech in communications made between the respondents with the researcher. The data was collected using observation and interviews. To maintain the validity of the data, then do recording engineering and technical note.

Data were analyzed by describing all the code says a local leader in the use of jargon associated with the regional autonomy of institutional arrangement, the arrangement of personnel, implementation of the authority, revenue villages, and local political institutionalization.

From the results of data analysis found two speech codes terjabar code and code that is limited. In terms of institutional arrangement and the arrangement of personnel, limited code more widely used than the code terjabar, among other things terjabar code often used by the head of the village pond and a few head of RT and RW. In connection with the implementation of the authority and the revenue village, a little also terjabar code that uses, among other village chiefs and village heads Pond. With regard to the institutionalization of local politics, the village also more limited use code. Limited codes most widely used by the village secretary and chairman of affairs. Other studies also can continue this research in terms of different places.